



LKj

**LAPORAN KINERJA
BAPPEDA LITBANG BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**BAPPEDA-LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

2024

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKj Tahun 2023 pada dasarnya menggambarkan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara utuh selama perjalanan Tahun 2023, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output dan outcome dari setiap program dan kegiatan.

Akhir kata, melalui penyampaian LKj Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Perencanaan Program dan Kegiatan tahun yang akan datang.

Manna, 18 Februari 2024

Kepala Bappeda Litbang



FIKRI ALJAUHARY, S.STP, MM

NIP. 19821001 200112 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur penunjang, yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang tugas pokoknya adalah melaksanakan fungsi Penunjang urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan telaah terhadap pernyataan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan termuat dalam misi ke-4 yakni **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi** yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja
2. Mewujudkan capaian kapasitas inovasi daerah.

Dengan target sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan Kinerja
2. Meningkatkan kualitas Pengukuran Kinerja
3. Meningkatkan capaian kapasitas Inovasi Daerah

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertuang dan Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Visi	Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)
Misi ke-4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Kebijakan OPD
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	1. Meningkatkan kooedinasi perencanaan, penegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Meningkatkan Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran 3. Meningkatkan kualitas kajian perencanaan pembangunan daerah	1. Perbaikan kualitas perencanaan pembangunan dengan melibatkan para pihak terkait 2. Percepatan Integrasi e-planning dan e-budgeting 3. Penusunan kajian yang mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah
	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja kinerja Bappeda Litbang	Perbaikan kualitas SDM Aparatur khususnya terkait perencanaan program
Menujudkan capaian kapasitas inovasi daerah	Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah	Percepatan penumbuhan inovasi daerah dengan terbentuknya Perbup tentang Inovasi Daerah

Dari penetapan tujuan, sasaran, Staregi dan kebijakan yang disusun oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana diatas, maka ditetapkan target capaian yang diharapkan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan indikator targetnya adalah :

1. Nilai Perencanaan Kinerja
2. Nilai Pengukuran Kinerja
3. Indeks Inovasi Daerah

Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang selama 5 (lima) Tahun, yaitu tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

No	IKU	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Perencanaan Kinerja	20,13	20,29	20,42	21.19	21,68
2	Nilai Pengukuran Kinerja	13,96	13,99	14,05	15,08	15.46
3	Indeks Inovasi Daerah	n/a	668	50,42	37,95	51,45

Sumber :

1. Kementerian PanRB
2. Kementerian Dalam Negeri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan LKj	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan LKj	3
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah	5
A. SOTK	7
B. Isu Strategis Perangkat Daerah	9
C. Keadaan Kepegawaian	10
D. Keadaan Sarana dan Prasarana	11
E. Keuangan	13
1.5. Sistematisasi LKj	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	19
A. Visi dan Misi Kepala Daerah	19
B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	26
C. Strategi dan arah kebijakan	28
2.2. Perjanjian Kinerja.....	29
2.3. Rencana Anggaran Perangkat Daerah	34
A. Target Belanja	34
B. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategi	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	40
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	44
3.3. Realisasi Anggaran	62
3.4. Inovasi Perangkat Daerah.....	66
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Rekomendasi	70
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1.	Komposisi Belanja APBD Tahun 2023 Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	39
Gambar 3. 1	Grafik Peningkatan Capaian Indikator 1 Sasaran 1.1	45
Gambar 3. 2.	Forum Konsultasi Publik.....	46
Gambar 3. 3.	Forum Lintas Perangkat Daerah	47
Gambar 3. 4.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	47
Gambar 3. 5.	Pendampingan SIPD.....	47
Gambar 3. 6.	Pendampingan OPD Bidang Infrastruktur	48
Gambar 3. 7.	Pendampingan OPD Mitra Bidang Perekonomian, SDA & Infrastruktur	48
Gambar 3. 8.	Asistensi OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	49
Gambar 3. 9.	Pendampingan Dana Kelurahan	49
Gambar 3. 10.	Grafik Peningkatan Capaian Indikator 1 Sasaran 1.2	50
Gambar 3. 11.	Pelaksanaan Rakorbang	52
Gambar 3. 12.	Penyampaian Dokumen Evaluasi RPJPD	53
Gambar 3. 13.	Grafik Peningkatan Capaian Indikator 2 Sasaran 1	55
Gambar 3. 14.	Kegiatan Pelatihan Inovasi.....	56
Gambar 3. 15.	Kegiatan Penginputan Inovasi.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jenjang Pendidikan SDM Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	10
Tabel 1. 2.	Komposisi Pegawai Non ASN Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023	11
Tabel 1. 3.	Profil Sarana Dan Prasarana Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	12
Tabel 1. 4.	Belanja pelaksanaan kegiatan Tahun 2023	14
Tabel 2. 1.	Visi dan Misi Kepala Daerah.....	25
Tabel 2. 2.	Tujuan Dan Sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	27
Tabel 2. 3.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	28
Tabel 2. 4.	Target Belanja pelaksanaan kegiatan Tahun 2023.....	34
Tabel 2. 5.	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	38
Tabel 3. 1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	41
Tabel 3. 2.	Pencapaian IKU Bappeda Litbang	42
Tabel 3. 3.	Urutan Skor IGA.....	43
Tabel 3. 4.	Realisasi Indikator 1 sasaran 1.1	44
Tabel 3. 5.	Realisasi Indikator 1 sasaran 1.2.....	50
Tabel 3. 6.	Realisasi Indikator 2 Sasaran 1	54
Tabel 3. 7.	Pencapaian Kinerja dan Serapan Anggaran Tujuan/Sasaran	58
Tabel 3. 8.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan.....	59
Tabel 3. 9.	Realisasi Belanja pelaksanaan kegiatan Tahun 2023.....	62

Bab 1 berisikan:

1. Latar Belakang
2. Tujuan Penyusunan LKj
3. Dasar Hukum Penyusunan LKj
4. Gambaran Umum PD
 - a. SOTK
 - b. Isu Strategis
 - c. Keadaan Pegawai
 - d. Keadaan Sarana dan Prasarana
 - e. Keuangan
5. Sistematika LKj

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, diperlukan penilaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah sebagai salah satu kunci. Hal ini selaras dengan tujuan perbaikan dan inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dukungan dari semua elemen masyarakat sangat diperlukan dalam perbaikan kinerja pemerintahan untuk mencapai daerah otonomi yang lebih baik.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan

realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang ada di lingkungan Pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

1.2. Tujuan Penyusunan LKj

LKj Bappeda Litbang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Badan selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap bidang. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Bappeda Litbang. Identifikasi potensi, keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintahan untuk meningkatkan kinerja melalui perbaikan pelayanan publik. LKj adalah Sebagai pembanding keberhasilan, capaian kinerja tahun 2023 juga dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang lalu. Analisis atas pembandingan capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini perlu dilakukan untuk melihat celah kinerja (*performance gap*) yang perlu diperbaiki oleh Bappeda Litbang dimasa datang. Adapun tujuan laporan adalah :

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Bappeda Litbang
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Bappeda Litbang.
3. Menemukan alternative pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

4. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Bappeda Litbang kepada Bupati
5. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Bappeda Litbang.
6. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Bappeda Litbang.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan LKj

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah yang merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Bappeda- Litbang didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Kinerja, diantaranya adalah:

1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 55, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu

Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur penunjang, yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang tugas pokoknya adalah melaksanakan fungsi Penunjang urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan telaah terhadap pernyataan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan termuat dalam misi ke-4 yakni ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi*** yang bertujuan untuk :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja
2. Mewujudkan capaian kapasitas inovasi daerah.
Dengan target sasarannya adalah sebagai berikut :
4. Meningkatnya kualitas Perencanaan Kinerja
5. Meningkatnya kualitas Pengukuran Kinerja
6. Meningkatnya capaian kapasitas Inovasi Daerah

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertuang dan Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Visi	Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)		
Misi ke-4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.		
Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Kebijakan OPD
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi perencanaan, penendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Meningkatkan Konsistensi antara perencanaan dan anggaran 3. Meningkatkan kualitas kajian perencanaan pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan kualitas perencanaan pembangunan dengan melibatkan para pihak terkait 2. Percepatan Integrasi e-planning dan e-budgeting 3. Penusunan kajian yang mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah
	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja kinerja Bappeda Litbang	Perbaikan kualitas SDM Aparatur khususnya terkait perencanaan program
Menujudkan capaian kapasitas inovasi daerah	Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah	Percepatan penumbuhan inovasi daerah dengan terbentuknya Perbup tentang Inovasi Daerah

A. SOTK

Merujuk ke Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian Pengembangan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Sedangkan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan ;
2. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang Perencanaan dan bidang Penelitian Pengembangan;
3. Pelaksanaan administrasi kedinasan di lingkungan badan;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

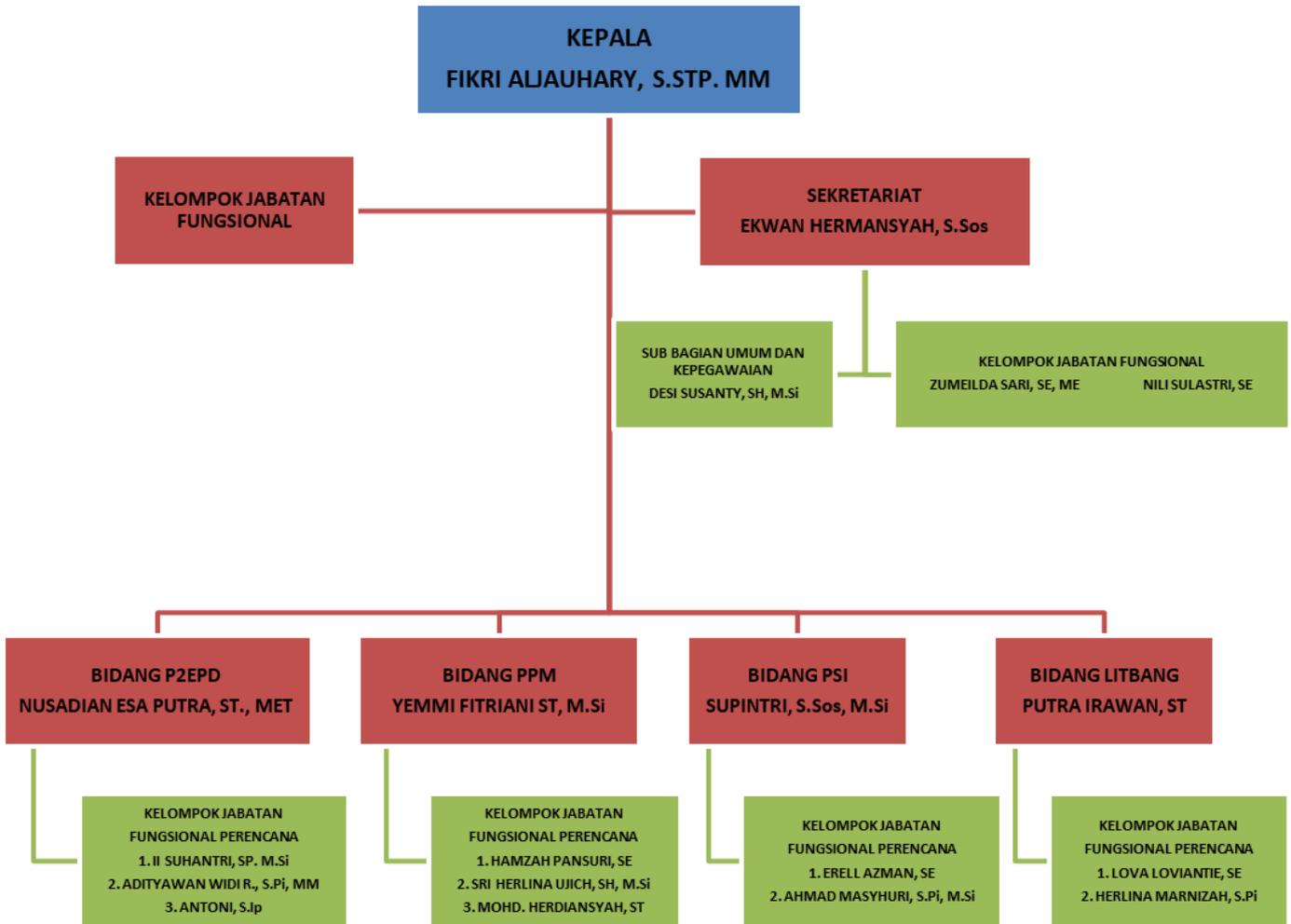
Dengan susunan Organisasi Badan terdiri atas :

- b. Kepala Badan.
- c. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud seperti digambarkan berikut :

Struktur Organisasi Bappeda Litbang



Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini Bappeda Litbang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bappeda Litbang sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses brainstorming dan mapping jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda Litbang, factor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappeda Litbang adalah sebagai berikut:

- 1 Belum terbangunnya sistem informasi data pembangunan yang menyeluruh dan terpadu
- 2 Belum optimalnya analisis usulan program dan kegiatan dengan OPD sehingga masih terjadi ketidaksesuaian antara output dan outcome yang dihasilkan.
- 3 Belum optimalnya hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan merumuskan Program prioritas Perencanaan yang merujuk kepada Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026. Rumusan Perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang diantaranya memuat kebijakan, tujuan dan sasaran. Dengan indikator yang terukur, baik indikator Kinerja Utama Kepala Bappeda Litbang, Sekretaris dan Kepala Bidang yang diimplimentasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

C. Keadaan Pegawai

Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Per Desember 2023, Bila dirunut per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut: S2 sebanyak 12 orang (26,67%) S1 sebanyak 31 orang (66,67%), D3 2 orang (4,44%) kemudian SLTA sebanyak 1 orang (2,22%). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik. Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jenjang Pendidikan SDM Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	0
2.	S2	14
3.	S1	29
4.	D3	2
5.	D2	0
5.	D1/SLTA/MA/SMK	1
6.	SLTP/MTs	0
7.	SD	0
Jumlah		46

Sumber : DUK Bappeda Litbang

Pegawai Non ASN

Selain Pegawai yang berstatus ASN pada Bappeda Litbang juga terdapat Tenaga Kerja Non ASN, secara lengkap komposisi Tenaga Non ASN Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan tugas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. 2. Komposisi Pegawai Non ASN Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

Nomor	Tugas	Jumlah
1	Programmer	4
2	Operator Komputer	18
3	Sopir	1
4	Penjaga Malam	1
5	Petugas Kebersihan	4
	Jumlah	28 orang

D. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan serta meningkatkan pelayanan publik pada Perangkat Daerah, maka Kondisi sarana dan prasarana pendukung Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung Kantor

Yang terdiri dari :

- a. Ruang Penerima Tamu tersedia Meja Resepsionis, Kursi Tanggu Tamu
- b. Ruang Kerja Kepala Badan tersedia Toilet, Meja dan Kursi Kerja, Kursi Tamu, Meja dan Kursi Rapat, TV 50 Inchi, Tablet dan Kulkas.
- c. Ruang Kerja Sekretariat tersedia Meja dan Kursi Kerja 20 set, Laptop 17 Unit, Printer 5 unit, Rak arsip 6 unit, dll sarpras pendukung.
- d. Ruang Kerja Bidang P2EPD tersedia 1 ruang tim IT, Server sipda, Meja dan Kursi Kerja 10 set, Laptop 8 unit, printer 2 unit, dll sarpras pendukung
- e. Ruang Kerja Bidang PSI tersedia Meja dan Kursi Kerja 10 set, Meja Tamu 1 Set, Laptop 6 unit, printer 2 unit, dll sarpras pendukung
- f. Ruang Kerja Bidang PPM tersedia Meja dan Kursi Kerja 10 set, Meja Tamu 1 set, Laptop 6 unit, printer 2 unit, dll sarpras pendukung
- g. Ruang Kerja Bidang Litbang tersedia Meja dan Kursi Kerja 8 set, Meja Tamu 1 set, Laptop 5 unit, printer 1 unit, dll sarpras pendukung
- h. Ruang arsip, Toilet Laki-laki dan toilet Perempuan.

2. Bangunan Aula tersedia Sarana Meja Rapat 9 unit, Kursi Rapat 60 Unit, Kursi Biro 4 Unit, Standing AC 4 Unit, dll Sarana Pendukung.

Sarana dan Prasarana secara detail pada Tabel berikut :

Tabel 1. 3. Profil Sarana Dan Prasarana Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

No.	Jenis	Kondisi		Total
		Baik	Buruk	
1.	Kursi Kerja			
	1. Kursi Tamu	2	0	2
	2. Kursi Rapat	60	50	110
	3. Kursi Putar	6	0	6
	4. Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	0	1
	5. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	0	5
	6. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	0	1
	7. Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	4	9	13
2.	Kendaraan Dinas/Operasional			
	1 Roda 4 (R-4)	6	0	6
	2 Roda 2 (R-2)	8	0	8
3.	Meja :			
	1 Meja Rapat	13	0	13
	2 Meja Biro	27	0	27
	3 Meja Tamu	5	0	5
	4 Meja Reseption	1	0	1
	4 Meja Rapat Pejabat Eselon II	1		1
4.	Komputer			
	1 PC Unit	5	0	5
	2 Laptop / Notebook	37	25	62
	3 Monitor	5	0	5
	4 Peralatan Personal Komputer Lain-lain	7	0	7
5.	Lemari			
	1 Lemari Kayu	14	0	14
	2 Lemari Kaca	2	3	5
	3 Lemari Es	1	0	1
6.	Stabilizer	0	3	3
7.	Alat Penghancur Kertas	3	0	3
8.	Mesin Absensi	0	1	1
9.	Mesin Air / Jet Pump / Pompa Air	1	0	1
10.	Unit Power Supply	1	0	1
11.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2	0	2



12.	Proyektor + Attachment	4	4	8
13.	AC			
	1 AC Unit	17	10	27
	2 AC Sentral	1	1	2
14.	Televisi	4	1	5
15.	Facsimile	1	0	1
16.	Unit Transcelver VHF Portable	1	0	1
17.	Unit Transcelver VHF Transportable	3	0	3
18.	Unit Pemancar MF/MW Portable	1	0	1
19.	Unit Pemancar VHF/FM Transportable	3	0	3
20.	Sound System	1	0	1
21.	Kamera			
	1 Camera Video	0	1	1
	2 Video Camera dan Recorder	0	1	1
	3 Camera Film	0	2	2
	4 Camera Elektronik	1	0	1
	5 Lensa Kamera	0	3	3
22.	Alat Hiasan	1	0	1
23.	Mimbar/Podium	1	0	1
24.	Miceophone Floor Stand	1	0	1
25.	Layar Film	2	0	2
26.	Tripod	2	1	3
27.	Printer	7	5	12
28.	Rak Besi/Metal	1	0	1
29.	Hard Disk	2	2	4
30.	Peralatan Jaringan Lain-lain	0	1	1
31.	Server	1	0	1
32.	Automatic Volatge Regulator (AVR)	1	0	1
33.	Tang	2	0	2
34.	Global Positioning System	2	0	2
35.	Scanner	0	1	1
36.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	0	2	2
37.	Loudspeaker	0	2	2
38.	Router / Wireless Router	1	0	1
39.	Microphone / Wireless Mic	1	0	1
40.	Mesin Penghitung Uang	0	1	1
41.	Moubiler Lainnya	0	2	2
42.	Peralatan Studio Visual Lainnya	0	1	1
T o t a l		434	96	530
(Persentase)		81,89	18,11	100

*Data Kartu Inventaris Ruangan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
(Tahun 2023)*

E. Keuangan

Anggaran

Sesuai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan mengelola anggaran sebesar Rp. 10.255.005.770, yang terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Belanja Operasi | Rp.9.501.922.220,- |
| - Belanja Pegawai | Rp.4.580.953.019,- |
| - Belanja Barang dan Jasa | Rp.4.920.969.201,- |
| 2. Belanja Modal | Rp. 753.083.550,- |

Dalam pencapaian kinerja organisasi, berikut disajikan rincian dana sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Tabel Berikut :

Tabel 1. 4. Belanja pelaksanaan kegiatan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Output (Keluaran)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	7.181.499.370,-	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	82.274.160,-	
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.480.000,-	Dokumen RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, Renja, Renja Perubahan dan Perubahan Renstra Lakip, LPPD, Lap. Triwulan dan Lap Tahunan
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.794.160,-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.939.243.239,-	
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.491.673.019,-	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN, Terlaksananya administrasi pelaksanaan Tugas ASN Dokumen laporan keuangan, Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430.080.000,-	
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.490.220,-	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.199.920,-	
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.199.920,-	Dokumen BMD SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154.877.700,-	
1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.513.200,-	Dokumen administrasi kepegawaian
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	142.364.500,-	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	722.194.120,-	
1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.439.000,-	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.606.000,-	
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.737.400,-	Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.416.720,-	makanan dan minuman Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90.000.000,-	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	448.995.000,-	Dalam Daerah, Luar Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.201.800,-	
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	285.927.7900,-	
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	285.927.7900,-	Dokumen administrasi kepegawaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.497.101,-	
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.497.101,-	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.083.540,-	
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.310.100,-	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.263.440,-	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.510.000,-	Terpeliharayan Gedung Kantor
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.107.978.000,-	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	468.681.000,-	
1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	93.356.000,-	Memingkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	375.425.000,-	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	181.561.000,-	
1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	181.561.000,-	Update data dan informasi pembangunan daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	305.000.000,-	
1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	120.000.000,-	Meningkatkan pencapaian kinerja program/kegiatan pemerintah daerah
2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	185.000.000,-	Peningkatan kualitas capaian pelaksanaan rencana pembangunan
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	152.736.000,-	
1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintah Daerah	152.736.000,-	Tersedianya jumlah data dalam system informasi Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.471.532.400,-	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	693.500.000,-	
1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	144.440.000,-	Tersedianya Dokumen Aksi Stunting
2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	80.060.000,-	Tersedianya laporan Hasil Evaluasi PAMSIMAS

3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJD, RPJMD dan RKPD)	99.000.000,-	Terlaksananya advokasi indikator SDG's
4. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	75.000.000,-	Jumlah OPD yang di asistensi
5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	150.000.000,-	Terlaksananya operasional tim TKPKD dan oprasional tim corporate social responsibility (CSR)
6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	145.000.000,-	Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang sosbud
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	487.268.000,-	
1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	48.765.000,-	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	138.953.000,-	Tersediannya Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Bidang Perekonomian
3. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	133.095.000,-	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA, Laporan gas rumah kaca (GRK), Dokumen RAD pangan dan Gizi, Laporan GRK Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	45.344.000,-	Tersediannya Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang SDA
5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	121.111.000,-	Tersediannya Laporan Hasil Verifikasi Bidang SDA
Koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	290.764.400,-	
1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	38.746.400,-	Tersediannya Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur
2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	252.018.000,-	Laporan pokja PKP, Peningkatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang keciptakaryaan dan kewilayahan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	493.996.000,-	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	186.100.000,-	
1. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	186.100.000,-	Laporan analisis indeks daya saing daerah dan penginputan indeks pengelolaan keuangan daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	120.100.000,-	
1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	120.100.000,-	Berkembangnya varietas unggul lokal kabupaten Bengkulu Selatan
Pengembangan inovasi dan Teknologi	187.796.000,-	
1. Penelitian, Pemhembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	153.296.000,-	Dokumen sistem inovasi daerah, Input indeks daerah, Lomba inovasi IPTEK
2. Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan	34.500.000,-	Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi

1.5 Sistematika LKj

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka format penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari :

BAB I Pendahuluan	: Pada bab ini disajikan penjelasan umum Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	: Menguraikan tentang ikhtisar Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023.
BAB III Akuntabilitas Kinerja	: Menggambarkan akuntabilitas kinerja yang mencakup: A. Capaian Indikator Kinerja Utama PD Capaian terhadap Kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, Membandingkan capaian dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, Dan membandingkan capaian tahun 2023 dengan standar Nasional.

	<p>B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya.</p> <p>C. Realisasi Anggaran Berisikan table realisasi anggaran disertai dengan penjelasan pencapaian terhadap target belanja yang sudah ditetapkan sebelumnya.</p> <p>D. Inovasi Perangkat Daerah Menjelaskan Inovasi yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja PD.</p>
<p>BAB IV Penutup</p>	<p>: Berisikan uraian simpulan umum atas capaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kinerjanya.</p>

Disamping itu, sebagai data pendukung juga dilampirkan Rencana Kerja Tahunan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan dan lain-lain yang dianggap relevan.

Bab 2 berisikan:

1. *Perencanaan Strategis*
 - a. *Visi dan Misi Kepala Daerah*
 - b. *Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah*
 - c. *Strategi dan arah kebijakan*
2. *Perjanjian Kinerja*
3. *Rencana Anggaran PD*
 - a. *Target Belanja*
 - b. *Alokasi Anggaran per sasaran Strategis*

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan kerangka Pembangunan Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai Dokumen perencanaan yang memuat penjabaran sesuai dengan kewenangannya. Memuat tujuan, sasaran dan program Bappeda Litbang. Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026. Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan.

A. Visi dan Misi Kepala Daerah

Bappeda Litbang mengampu urusan perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan urusan dan program yang diampu, Bappeda Litbang mendukung Visi “Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS Berlandaskan CINTA BS” yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang mempunyai 4 (empat) misi yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing.
2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing;.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.

1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2021 – 2026 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu

***“Terwujudnya Masyarakat Madani
Menuju Bengkulu Selatan EMAS
Berlandaskan CINTA BS”***

Penjelasan Visi:

Masyarakat madani yang ingin diwujudkan merupakan sebuah kondisi masyarakat yang berperadaban, dilandasi kokohnya kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan agamis, yang mengacu kepada nilai-nilai dasar persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada prinsip masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, saling toleransi, aspiratif, mampu berkoordinasi, mengakui emansipasi, dan menghormati hak asasi.

Untuk mewujudkan tatanan masyarakat madani tersebut, perlu ditingkatkan dan dilanjutkan pembangunan pondasi yang menopang pilar tegaknya kesejahteraan masyarakat, melalui:

- 1 Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi kinerja,
- 2 Pembangunan jaringan ekonomi yang lebih luas yang berorientasi pada peningkatan added value (nilai tambah),

3 Peningkatan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi dan berkeadilan.

Guna merealisasikan visi mewujudkan masyarakat madani, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyelenggarakan pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif, aspiratif dan merata, untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Elok : merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik itu dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang dibentuk dari budaya, pariwisata maupun kearifan lokal.

Maju : mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang.

Aman : adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Sejahtera: merupakan suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan EMAS tersebut, akan dibangun dan dikembangkan lebih lanjut nilai-nilai yang dirasa mampu mendorong keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menumbuhkan

empati, rasa saling menghargai, rasa saling memiliki dan rasa bertanggung jawab sehingga mampu mengembangkan semangat gotong royong ditengah masyarakat yang dikemas ke dalam formula “**CINTA BS**”

“CINTA BS” merupakan sebuah formulasi dari komitmen yang akan diwujudkan dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- C = **C**erdas
- I = **I**ntegritas
- N = **i**Novatif
- T = **T**auladan
- A = **A**gamis
- BS = **B**erdaya **S**aing tinggi

CINTA BS tidak hanya menjadi sebuah bentuk rasa memiliki Bengkulu Selatan, namun lebih jauh diharapkan dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan, bahwa masyarakat Bengkulu Selatan secara cerdas akan mendukung pembangunan guna mewujudkan Bengkulu Selatan yang lebih indah dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel, mampu berkompetisi dengan tangguh berlandaskan nilai-nilai agama dan adat, sehingga menempatkan Bengkulu Selatan sebagai daerah yang berdaya saing, sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya.

2. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, disusun misi sebagai langkah untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian visi.

1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing.

Misi ini mengarah pada upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Bengkulu Selatan, agar mampu bersaing

secara kompetitif dengan dilandasi kompetensi dan kualifikasi yang tinggi.

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia semata, namun lebih jauh juga fokus pada upaya bagaimana membentuk karakter masyarakat Bengkulu Selatan yang semakin maju dan berkeadilan, namun tetap menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Bengkulu Selatan berdasarkan kearifan lokal.

2) Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi ini mengarah pada komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur yang mantap dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bengkulu Selatan, melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan, kawasan permukiman, dan infrastruktur strategis dan prioritas lainnya yang terintegrasi dalam sebuah jaring pembangunan kawasan maju dan produktif.

3) Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing.

Misi ini diarahkan untuk mendorong keberhasilan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pada pengembangan UMKM, industrialisasi, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan mempunyai nilai tambah.

Pembangunan ekonomi bagi semua (*inklusif*), bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing ekonomi daerah, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah perdagangan besar dan kecil, peningkatan kontribusi sektor pariwisata yang berdaya saing, peningkatan kinerja investasi daerah, serta peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi kreatif berdasarkan kearifan lokal.

4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.

Misi ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan, yang ditunjukkan peningkatan implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Reformasi birokrasi yang dilakukan, kedepan akan secara optimal memanfaatkan kemajuan teknologi informasi menuju terbangunnya sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, akuntabel, efektif dan efisien, yang berkorelasi positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Pelayanan publik yang prima diwujudkan dengan membangun *open government* melalui keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga diwujudkan dengan pemerintahan yang responsif yang tercermin dalam cepat dan tepatnya respon pemerintah daerah dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan.

Dari uraian dan penjabaran diatas, visi dan misi Kepala Daerah dituangkan dalam Tabel Berikut :

Tabel 2. 1. Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI	Misi	Sasaran Daerah
Terwujudnya Masyarakat Madani menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera) Berlandaskan CINTA-BS	1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, sejahtera dan berdaya saing	Tujuan 1.1: Mewujudkan sumber daya manusia yang sejahtera, berkualitas dan berdaya saing
		Sasaran 1.1.1: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
		Sasaran 1.1.2: Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
		Sasaran 1.1.3: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
	2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Tujuan 2.1: Meningkatnya pemerataan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan
		Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis secara berkelanjutan
		Sasaran 2.1.2: Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan
		Sasaran 2.1.3: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

VISI	Misi	Sasaran Daerah
		Sasaran 2.1.4: Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana
	3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing	Tujuan 3.1: Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing
		Sasaran 3.1.1: Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah
		Sasaran 3.1.2: Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah
		Sasaran 3.1.3: Meningkatnya ketahanan pangan daerah
	4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Tujuan 4.1: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Sasaran 4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya kualitas pelayanan public

Sumber : RPJMD 2021-2026

B. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan pernyataan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki keterkaitan secara

langsung dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan termuat dalam :

Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Tujuan : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur penunjang, yang tugas pokoknya adalah melaksanakan fungsi Penunjang urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan Misi ke-4 Kepala Daerah dengan fungsi Bappeda Litbang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, sehingga dirumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 2. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja	Nilai Perencanaan dan pengukuran kinerja	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai perencanaan kinerja	20,00-25,00	23,00-25,00	25,00-27,00	27,00-29,00	29,00-30,00	30,00
			Meningkatnya	Nilai	13,00-20,00	15,00-16,00	17,00	18,00	19,00	20,00

			kualitas pengukuran kinerja	pengukuran kinerja						
2	Mewujudkan capaian kapasitas inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	60,00-65,00	60,00-65,00	55,00-60,00	60,00-65,00	65,00-70,00	70,00-75,00

Sumber : Renstra Bappeda Litbang 2021-2026

C. Strategi dan arah kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda Litbang mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Adapun Strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2. 3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)		
Misi ke-4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi perencanaan, penendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Meningkatkan Konsistensi antara perencanaan dan anggaran 3. Meningkatkan kualitas kajian perencanaan pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki kualitas perencanaan pembangunan dengan melibatkan para pihaK terkait 2. Percepatan Integrasi e-planning dan e-budgeting 3. Penyusunan kajian yang mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah

	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja Bappeda Litbang	Perbaikan kualitas SDM Aparatur khususnya terkait perencanaan program
Menujudkan capaian kapasitas inovasi daerah	Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah	Percepatan penumbuhan inovasi daerah dengan terbentuknya Perbup tentang Inovasi Daerah

Sumber : Renstra Bappeda Litbang 2021-2026

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja yang ingin dicapai untuk mewujudkan kinerja yang baik berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki, maka Bappeda Litbang kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan perjanjian kinerjanya sebagai berikut :

A. Perjanjian Kinerja Pejabat Esselon II

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai perencanaan kinerja	Angka	25,00-27,00
2	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai pengukuran kinerja	Angka	17,00
3	Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Indeks	65,01-70,00

Anggaran Organisasi Perangkat Daerah :

- APBD = Rp. 8.341.635.010
- APBN = Rp.

B. Perjanjian Kinerja Pejabat Esselon III

1. Jabatan : Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Nilai AKIP	75-80
2	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Indeks Kepuasan ASN	75%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi keuangan dan barang milik daerah	LHP BPK (TGR dan Administratif)	0 (TGR)
			100% (Administrasi)

Program /Kegiatan	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	5.824.657.010
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	81.964.160
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.425.712.455
Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	14.999.920
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	152.364.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	590.968.120
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah	104.574.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	236.245.755
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.827.300

2. Jabatan : Kabid Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Sasaran Program: Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah	Nilai Perencanaan Kinerja	NILAI	20,29
	Sasaran Kegiatan: 1. Meningkatkan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.Persentase keselarasan program dalam dokumen perencanaan	%	80
	2. Meningkatkan potensi pendanaan pembangunan daerah	2.Persentase peningkatan potensi pendanaan pembangunan daerah	%	10
2.	Sasaran Program:	Persentase ketersediaan	%	

	Meningkatnya kualitas Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	data dan informasi pembangunan daerah berkualitas		85
	Sasaran Kegiatan: 1. Optimalisasi implementasi e-planning 2. Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan	1. Persentase pemanfaatan e-planning dalam perencanaan 2. Persentase updating data dan informasi pembangunan daerah	% %	85 75
	Sasaran Program: Meningkatnya kualitas evaluasi, pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah	Nilai pengukuran Kinerja	NILAI	13,99
3.	Sasaran Kegiatan: 1. Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah 2. Meningkatnya capaian target kinerja pembangunan daerah	1. Persentase pencapaian indikator makro daerah 2. Persentase capaian pembangunan sesuai target kinerja	% %	80 80

Program /Kegiatan		Anggaran
	Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	937.978.000
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	492.000.000
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	162.100.000
3	Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	250.000.000
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di bidang Pembangunan Daerah	33.878.000

3. Jabatan : Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terwujudnya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100%
2.	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%

3.	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terwujudnya Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100%
4.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100%
5.	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Kegiatan TKPKD dan CSR)	Terwujudnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Kegiatan TKPKD dan CSR)	100%
6.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100%

Program /Kegiatan	Anggaran
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	600.000.000

4. Jabatan : Kabid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan lingkup bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perangkat daerah	1. Persentase pelaksanaan hasil verifikasi 2. Persentase dokumen teknis yang dihasilkan
2.	Mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah b Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	Perentase target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dan 3 dalam RPJMD	Perentase target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dan 3 dalam RPJMD tercapai

Program /Kegiatan	Anggaran
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	360.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	240.000.000

5. Jabatan : Kabid Penelitian dan Pengembangan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Meningkatnya inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Skors Indeks Inovasi Daerah	60 (Sangat Inovatif)
2.	Meningkatnya Kualitas Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah Sosialisasi Desiminasi	1 kali
3.	Meningkatnya Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dikembangkan	25%
4.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Terpenuhnya Komponen Indeks Daya Saing Daerah, Persentase Terpenuhnya Dimensi Indeks Pengukuran Keuangan Daerah	85%

Program /Kegiatan		Anggaran
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	379.000.000
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	151.000.000
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonom dan Pembangunan	85.000.000
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	143.000.000

2.3 Rencana Anggaran Perangkat Daerah

A. Target Belanja

Sesuai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, Target Belanja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp. 10.255.005.770, yang terdiri dari :

Tabel 2. 4. Target Belanja pelaksanaan kegiatan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Output (Keluaran)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	7.181.499.370,-	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	82.274.160,-	
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.480.000,-	Dokumen RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, Renja, Renja Perubahan dan Perubahan Renstra Lakip, LPPD, Lap. Triwulan dan Lap Tahunan
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.794.160,-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.939.243.239,-	
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.491.673.019,-	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN, Terlaksananya administrasi pelaksanaan Tugas ASN Dokumen laporan keuangan, Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430.080.000,-	
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.490.220,-	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.199.920,-	
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.199.920,-	Dokumen BMD SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154.877.700,-	
3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.513.200,-	Dokumen administrasi kepegawaian
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	142.364.500,-	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	722.194.120,-	
7. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.439.000,-	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.606.000,-	Peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.737.400,-	Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya makanan dan minuman
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.416.720,-	Tersedianya barang cetak dan penggandaan
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90.000.000,-	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	448.995.000,-	Dalam Daerah, Luar Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.201.800,-	
2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.927.7900,-	
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	285.927.7900,-	Dokumen administrasi kepegawaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.497.101,-	
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.497.101,-	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.083.540,-	
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.310.100,-	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.263.440,-	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.510.000,-	Terpeliharanya Gedung Kantor
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.107.978.000,-	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	468.681.000,-	
3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	93.356.000,-	Memingkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	375.425.000,-	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	181.561.000,-	
2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	181.561.000,-	Update data dan informasi pembangunan daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	305.000.000,-	
3. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	120.000.000,-	Meningkatkan pencapaian kinerja program/kegiatan pemerintah daerah
4. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	185.000.000,-	Peningkatan kualitas capaian pelaksanaan rencana pembangunan
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	152.736.000,-	
2. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintah Daerah	152.736.000,-	Tersedianya jumlah data dalam system informasi Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola
PROGRAM KOORDINASI DAN	1.471.532.400,-	

SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	693.500.000,-	
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	144.440.000,-	Tersedianya Dokumen Aksi Stunting
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	80.060.000,-	Tersedianya laporan Hasil Evaluasi PAMSIMAS
9. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.000.000,-	Terlaksananya advokasi indikator SDG's
10. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	75.000.000,-	Jumlah OPD yang di asistensi
11. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	150.000.000,-	Terlaksananya operasional tim TKPKD dan oprasional tim corporate social responsibility (CSR)
12. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	145.000.000,-	Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang sosbud
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	487.268.000,-	
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	48.765.000,-	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
7. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	138.953.000,-	Tersediannya Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Bidang Perekonomian
8. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	133.095.000,-	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA, Laporan gas rumah kaca (GRK), Dokumen RAD pangan dan Gizi, Laporan GRK Kabupaten Bengkulu Selatan
9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	45.344.000,-	Tersediannya Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang SDA
10. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	121.111.000,-	Tersediannya Laporan Hasil Verifikasi Bidang SDA
Koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	290.764.400,-	
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	38.746.400,-	Tersediannya Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	252.018.000,-	Laporan pokja PKP, Peningkatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang keciptakaryaan dan kewilayahan

Infrastruktur		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	493.996.000,-	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	186.100.000,-	
2. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	186.100.000,-	Laporan analisis indeks daya saing daerah dan penginputan indeks pengelolaan keuangan daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	120.100.000,-	
2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	120.100.000,-	Berkembangnya varietas unggul lokal kabupaten Bengkulu Selatan
Pengembangan inovasi dan Teknologi	187.796.000,-	
3. Penelitian, Pemhembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	153.296.000,-	Dokumen sistem inovasi daerah, Input indeks daerah, Lomba inovasi IPTEK
4. Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan	34.500.000,-	Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi

Sumber : APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

B. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Terkait Belanja penyelenggaraan Program dan Kegiatan, diprioritaskan untuk pencapaian tujuan organisasi, komposisi target belanja dalam APBD Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung yang diperuntukkan untuk mendanai Belanja Pegawai.

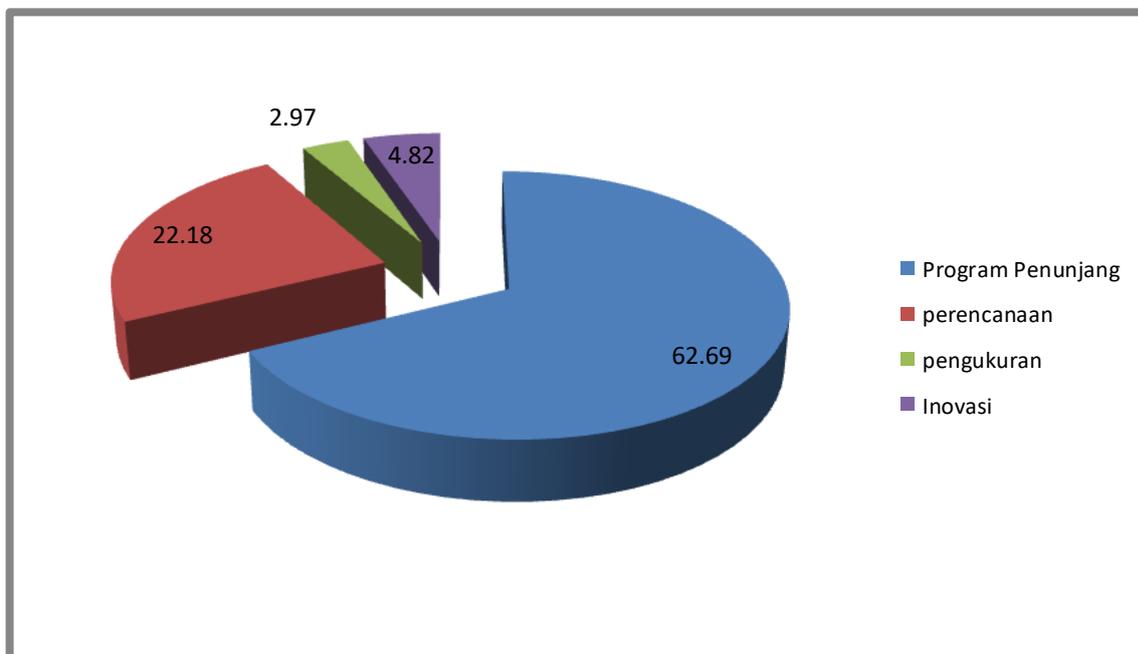
Sedangkan Belanja Langsung untuk mendanai pelaksanaan Program dan Kegiatan guna pencapaian sasaran strategis Bappeda Litbang, yang alokasi anggarannya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 5. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Nilai Perencanaan Kinerja	Meningkatnya kualitas penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja	802.978.000
			Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi RKPD dengan RPJMD dan Renstra OPD	693.500.000
			Meningkatnya kualitas Perencanaan lingkupbidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi Perangkat Daerah	778.032.400
2	Meningkatnya Pengukuran Kinerja	Nilai Pengukuran Kinerja	Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Nilai Pengukuran Kinerja	305.000.000
3	Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pembangunan	Persentase Penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan pembangunan	306.200.000
			Meningkatnya penguatan ekosistem	Persentase peningkatan indeks inovasi	187.796.000

Alokasi anggaran per sasaran Strategis adalah untuk pencapaian tujuan organisasi, yaitu : meningkatnya kualitas Perencanaan Kinerja sebesar 22,18%, untuk pencapaian meningkatnya kualitas pengukuran kinerja sebesar 2,97% dan untuk pencapaian meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah sebesar 4,82%, seperti gambar berikut :

Gambar 2. 1. Komposisi Belanja APBD Tahun 2023 Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber : APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023.

Bab 3 berisikan:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama PD
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3. Realisasi Anggaran
4. Inovasi Perangkat Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Bappeda Litbang bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Berbagai metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauh mana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kerjanya.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sebagai ukuran / standar penilaian untuk mengukur terhadap keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja tersebut dapat digunakan *Skala Ordinal*, yaitu :

Tabel 3. 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤	Sangat Tinggi	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

Pengukuran Kinerja dari sasaran strategis dapat dilakukan dengan berbagai metode yang telah dituliskan di atas, yang paling umum yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, dari target kinerja dari sasaran strategis telah ditetapkan maka dapat diukur

kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2. Pencapaian IKU Bappeda Litbang

NO	INDIKATOR KINERJA	2023			Target Akhir	Capaian
		Target	Realisasi	% Realisasi	Renstra 2026	2022
1.	Nilai Perencanaan Kinerja	25-27	21,68	86,72%	30	21,19
2.	Nilai Pengukuran Kinerja	17	15,46	90,94%	20	15,08
3.	Indeks Inovasi Daerah	55,00-60,00	51,45	93,55%	70,00-75,00	37,59

Sumber : KemenpanRB dan Kemendagri

Untuk nilai SAKIP Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 mendapatkan predikat B dengan nilai 62,16, mengalami peningkatan nilai dari tahun 2022 yaitu diangka 61,11 tetap di predikat B, dimana Bappeda Litbang mengampu 2 (dua) komponen yaitu Perencanaan Kinerja dengan pencapaian nilai 21,68 dan Pengukuran Kinerja yang mencapai nilai 15,46. Nilai Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang lalu.

Inovasi Daerah menjadi Daya Saing yang pada saat ini menjadi salah satu parameter dalam konsep wilayah berkelanjutan. Tingkat daya saing suatu daerah juga menjadi salah satu ukuran kesejahteraan yang menekankan pentingnya melakukan inovasi dalam mendorong efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Hasil evaluasi terhadap meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 sebesar 51,45 dengan kategori inovative yang berada di urutan ke 107 secara Nasional tingkat Kabupaten, dimana Meningkat dari tahun 2022 yang berada pada urutan ke 272 secara Nasional tingkat kabupaten, dengan skor sebesar 37,95.

Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Standar Nasional

Untuk capaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, yang berdasarkan pada standar nasional yaitu nilai inovasi daerah yang diperlombakan pada IGA, dimana penilaiannya dilakukan oleh Kemendagri.

Skor IGA Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Tahun 2023, hasil verifikasi Tim IGA Pusat dengan nilai 51,45 dengan kategori Inovatif, yang berada pada posisi ke 107 secara nasional untuk tingkat Kabupaten.

Berikut Tabel urutan skor nilai IGA :

Tabel 3. 3. Urutan Skor IGA

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat	Peringkat Nasional
1	Provinsi Bengkulu	51,49	Inovatif	17
No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat	Peringkat Nasional
1	Kota Bengkulu	69,46	Sangat Inovatif	8
No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat	Peringkat Nasional
1	Kab. Bengkulu Selatan	51,45	Inovatif	107
2	Kab. Kaur	48,39	Inovatif	145
3	Kab. Bengkulu Utara	48,16	Inovatif	146
4	Kab. Kepahiang	48,15	Inovatif	147
5	Kab. Lebong	45,92	Inovatif	182
6	Kab. Seluma	42,73	Inovatif	230
7	Kab. Rejang Lebong	40,69	Inovatif	249
8	Kab. Bengkulu Tengah	34,18	Kurang Inovatif	299

9	Kab. Mukomuko	32,89	Kurang Inovatif	302
---	---------------	-------	-----------------	-----

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023 bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan urutan ke-1 tingkat Kabupaten, hal ini naik secara signifikan dari tahun sebelumnya yang diurutan ke 8 di Provinsi Bengkulu.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini evaluasi dan analisis capaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode pertama Renstra 2021-2026 :

SASARAN 1.1:

“Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas perencanaan Kinerja melalui 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka capaian kinerja sebesar **86,72% dengan predikat “Tinggi”**.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

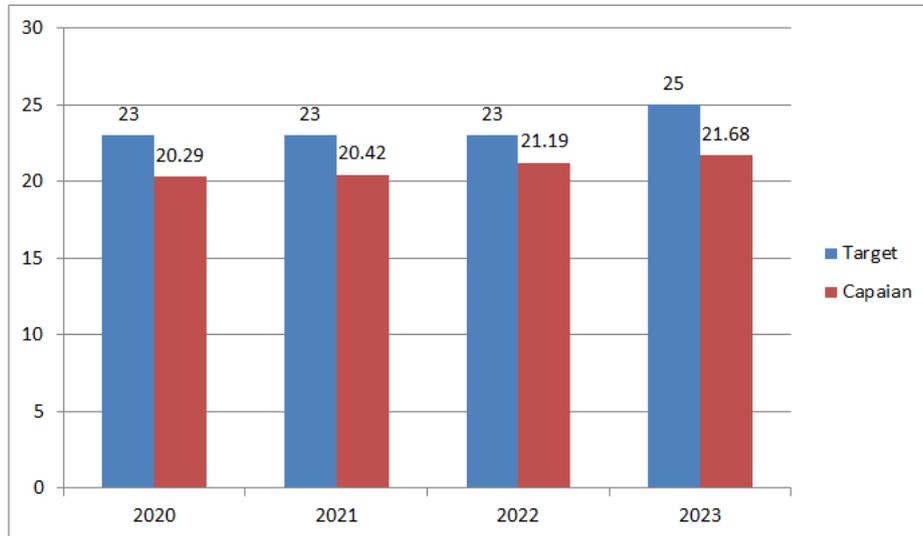
Tabel 3. 4. Realisasi Indikator 1 sasaran 1.1

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s.d 2023 thd Target Renstra
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai perencanaan kinerja pada komponen SAKIP	20,29	20,42	21,19	25-27	21,68	86,72	30	72,27%

Berdasarkan data pada tabel 3.4 tersebut, dapat diketahui capaian dari indikator nilai perencanaan kinerja pada komponen SAKIP sampai dengan tahun 2023 sebesar 72,27% dengan predikat “Sedang” dari target 30 dengan realisasi 21,68. Adapun indikator ini merupakan capaian target yang telah ditetapkan dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya realisasinya terus mengalami peningkatan. Peningkatan

capaian dari indikator nilai perencanaan kinerja pada komponen SAKIP ditunjukkan pada grafik berikut ini :

Gambar 3. 1 Grafik Peningkatan Capaian Indikator 1 Sasaran 1.1



Sumber : Kemenpan RB

Faktor pendorong berhasilnya sasaran ini adalah dari capaian kinerja Program pendukung sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sudah diterbitkannya Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja an Pengukuran Kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Melakukan evaluasi, Verifikasi dan penyempurnaan terhadap indicator kinerja perangkat daerah yang tidak memenuhi kriteria SMART.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Belum terbangunnya system informasi data pembangunan yang menyeluruh.
2. Pada Beberapa Perangkat Daerah Penetapan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya.

Solusi :

1. Akan mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian perangkat daerah dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan kegiatan-kegiatan/aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut.
2. Akan melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja khususnya untuk target-target yang telah dicapai melebihi dari target ditahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya.

Sementara itu, dalam proses penyusunan tahapan perencanaannya Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung proses penyusunan tahapan perencanaan tersebut antara lain :

1. Forum Konsultasi Publik



Gambar 3. 2. Forum Konsultasi Publik

2. Koordinasi dan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah



Gambar 3. 3. Forum Lintas Perangkat Daerah

3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten



Gambar 3. 4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

4. Pendampingan SIPD kepada Perangkat Desa untuk penginputan usulan Desa



Gambar 3. 5. Pendampingan SIPD

5. Sinergitas dan Harmonisasi Dokumen Renstra, Renja OPD Mitra Infrastruktur (Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan dan BPBD)



Gambar 3. 6. Pendampingan OPD Bidang Infrastruktur

6. Pendampingan OPD Mitra



Gambar 3. 7. Pendampingan OPD Mitra Bidang Perekonomian, SDA & Infrastruktur

7. Sinergitas dan Harmonisasi Dokumen Renstra, Renja OPD dan DPA Mitra Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) 2 (Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pora, Perpustakaan dan Kearsipan)



Gambar 3. 8. Asistensi OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

8. Rapat Koordinasi Dana Kelurahan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023



Gambar 3. 9. Pendampingan Dana Kelurahan

SASARAN 1.2:

“Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas pengukuran Kinerja melalui 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka capaian kinerja sebesar **90,94% dengan predikat “Tinggi”**.

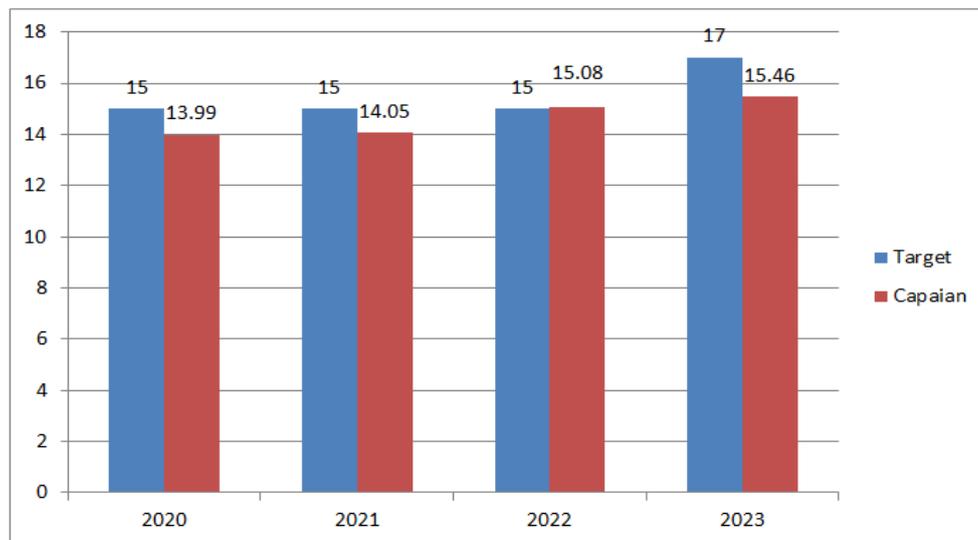
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3. 5. Realisasi Indikator 1 sasaran 1.2

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s.d 2023 thd Target Renstra
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai perencanaan kinerja pada komponen SAKIP	13,99	14,05	15,08	17	15,46	90,94	20	77,30%

Berdasarkan data pada tabel 3.5 tersebut, dapat diketahui capaian dari indikator nilai pengukuran kinerja pada komponen SAKIP sampai dengan tahun 2023 sebesar 77,30% dengan predikat “Tinggi” dari target 20 dengan realisasi 15,46. Adapun indikator ini merupakan capaian target yang telah ditetapkan dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya realisasinya telah mengalami peningkatan. Peningkatan capaian dari indikator nilai perencanaan kinerja pada komponen SAKIP ditunjukkan pada grafik berikut ini :

Gambar 3. 10. Grafik Peningkatan Capaian Indikator 1 Sasaran 1.2



Sumber : Kemenpan RB

Faktor pendorong berhasilnya sasaran ini adalah :

1. Sudah diterbitkannya Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja an Pengukuran Kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Melakukan evaluasi, Verifikasi dan penyempurnaan terhadap indicator kinerja perangkat daerah yang tidak memenuhi kriteria SMART.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi, berupa aplikasi manajemen kinerja untuk mempermudah pimpinan dalam memantau progress capaian kinerja Pemda maupun Perangkat Daerah.
2. Hasil Pengukuran Kinerja Organisasi belum dijadikan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

Solusi :

1. Akan Membangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja level Pemda maupun Perangkat Daerah.
2. Akan Mendorong perangkat daerah untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit dibawahnya secara berkala dan menerapkan kebijakan reward and punishment dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi.

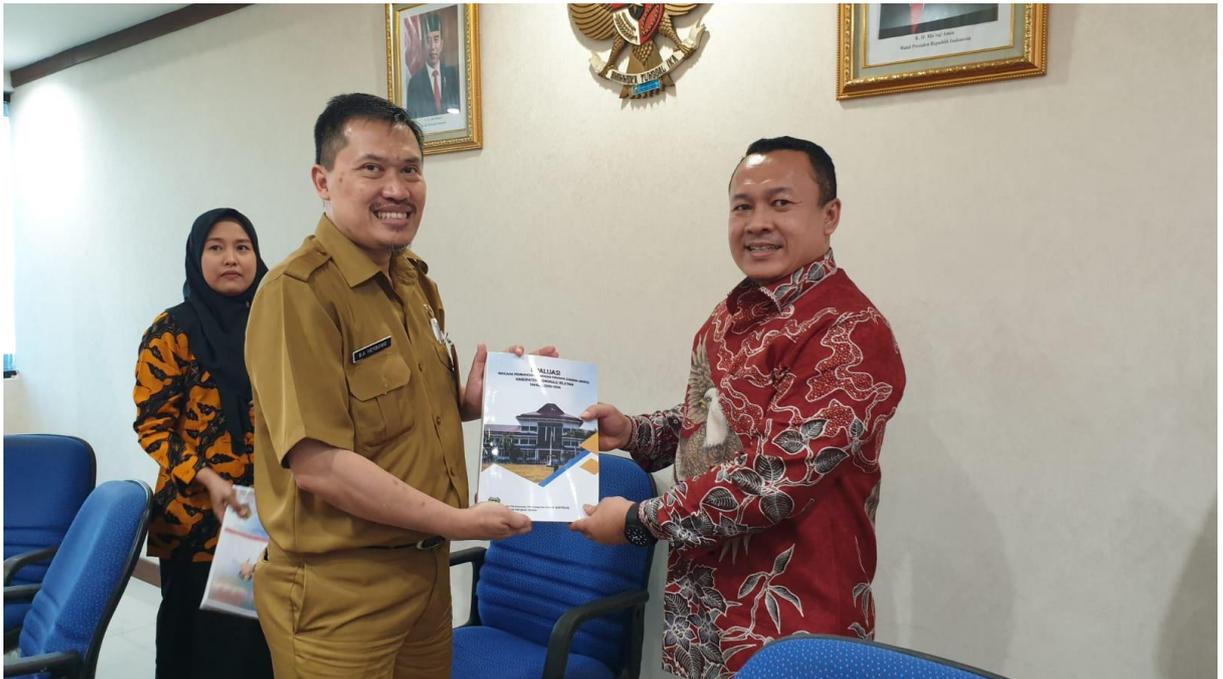
Sementara itu, dalam proses tahapan pengukuran kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung proses tahapan pengukuran kinerja tersebut antara lain :

1. Rakorbang



Gambar 3. 11. Pelaksanaan Rakorbang

2. Evaluasi RPJPD



Gambar 3. 12. Penyampaian Dokumen Evaluasi RPJPD

3. Penyusunan Laporan Triwulan

Mengakomodir Perangkat Daerah dalam menginput realisasi fisik dan Keuangan ke e-monev pada aplikasi sipda.bengkuluselatankab.go.id, sebelum tanggal 10 setiap awal triwulan berikutnya.

Sasaran 2.

“Meningkatnya capaian kapasitas Inovasi Daerah”

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kualitas capaian kapasitas Inovasi Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan capaian kinerja sebesar **93,55% dengan predikat “Sangat Tinggi”**.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

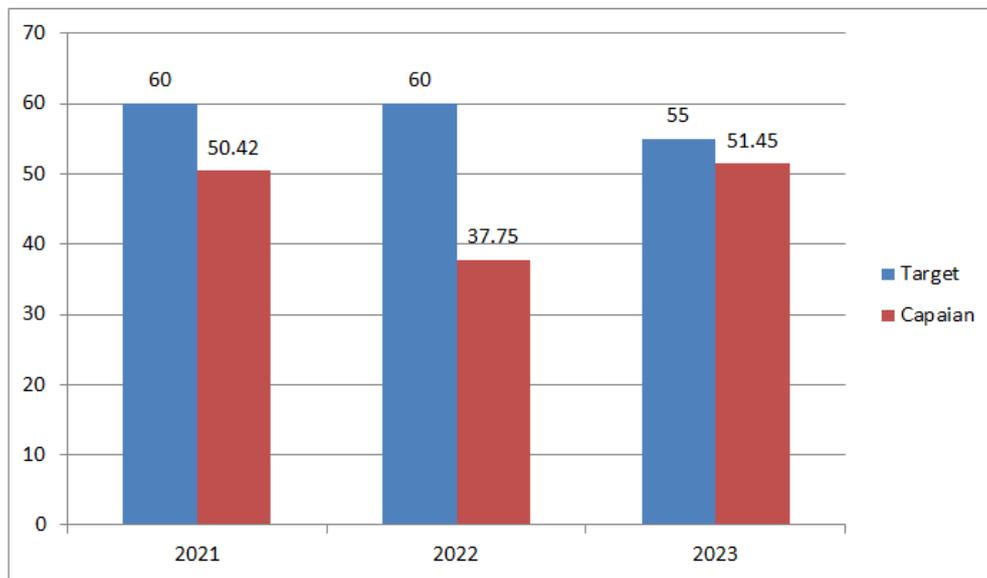
Tabel 3. 6. Realisasi Indikator 2 Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s.d 2023 thd Target Renstra
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Meningkatnya capaian kapasitas Inovasi Daerah	668	50,42	37,95	55,00	51,45	93,55%	75	68,60%

Sumber : Penilaian IGA Kementerian Dalam Negeti

Berdasarkan data pada tabel 3.6 tersebut, dapat diketahui capaian dari indikator persentase pencapaian target kinerja Inovasi daerah sampai dengan tahun 2023 berdasarkan target akhir Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 sebesar 68,60% dengan predikat “Sedang” dari target 75,00 dengan realisasi 51,45. Capaian Indikator ini pada tahun 2023 mengalami Kenaikan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 51,45 dari target 55,00 atau sebesar 93,55%. Dimana dapat di lihat bahwa capaian tahun 2022 sebesar 37,95 dan Tahun 2023 sebesar 51,45 dengan kenaikan sebesar 30,30%. Pencapaian target kinerja inovasi daerah ditunjukkan dalam grafik berikut ini :

Gambar 3. 13. Grafik Peningkatan Capaian Indikator 2 Sasaran 1



Faktor pendorong meningkatnya sasaran ini adalah :

1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Inovasi Daerah yang diadakan oleh BPSDM Kemendagri.
2. Melakukan Pembinaan kepada seluruh OPD dalam penginputan Inovasi di Website.
3. Melakukan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan ke berbagai daerah guna mendapatkan ilmu yang dapat diterapkan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Keseriusan OPD dalam mengusung Inovasi Daerah belum Optimal.
2. Tingkat Kematangan Inovasi Masih mayoritas Sedang dan Belum ada inovasi dengan kematangan Tinggi.
3. Belum menyusun Roadmap Sida sebagai penguat inovasi daerah di Kabupaten.

Solusi :

1. Akan Menyusun Roadmap Sida sebagai penguat inovasi daerah.
2. Akan terus Mendorong perangkat daerah agar lebih serius dalam mengusung Inovasi.

Dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah untuk sasaran 2, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Inovasi Daerah yang di adakan Oleh BPSDM Kemendagri



Gambar 3. 14. Kegiatan Pelatihan Inovasi

Mengirimkan satu ASN untuk mengikuti DIKLAT Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah Angkatan IV Tahun 2023 yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri

2. Melakukan Pembinaan kepada Seluruh OPD dalam Penginputan Inovasi di website



Gambar 3. 15. Kegiatan Penginputan Inovasi

Kegiatan Pembinaan kepada seluruh OPD ini merupakan tahap awal untuk memberikan informasi dan persiapan dalam melengkapi dokumen dan data yang harus dilengkapi dan di upload di website, kegiatan ini berlangsung selama 2 Minggu berdasarkan draft OPD yang diundang per harinya. Kegiatan ini dilakukan di bidang Litbang.

3. Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi



Upaya untuk meningkatkan penguatan ekosistem inovasi daerah, Bidang Litbang melakukan kegiatan kordinasi dan konsultasi ke Pusat dan berbagai daerah guna untuk mendapatkan ilmu yang dapat diterapkan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya pada pencapaian kinerja (Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang tahun 2023) pada table berikut :

Tabel 3. 7. Pencapaian Kinerja dan Serapan Anggaran Tujuan/Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINEEJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Nilai Perencanaan Kinerja	86,72	99,01	-12,29
2.	Meningkatnya kualitas Pengukuran Kinerja	Nilai Pengukuran Kinerja	90,94	99,27	-8,33
3.	Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	93,55	98,72	-5,17

Sumber : Diolah oleh Tim Penyusunan LKj Bappeda Litbang

Keterangan :

- Capaian Kinerja : Realisasi Indikator / Target Indikator x 100%
- Penyerapan Anggaran : Realisasi Keuangan Program/Kegiatan yang mendukung Indikator
- Tingkat Efisiensi : Capaian Kinerja – Penyerapan Anggaran

Pada pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023, berdasarkan Tabel 3.7 diatas, walaupun tingkat efisien penyerapan anggaran atas capaian kinerja terjadi in efisien akan tetapi pada pencapaian sasaran strategis adalah memuaskan yang terlihat dari Pencapaian Indikator untuk Perencanaan dan Pengukuran Kinerja dengan Kriteria “Tinggi” dan Pencapaian Indikator Indeks Inovasi Daerah dengan Kriteria “Sangat Tinggi”.

Secara keseluruhan, dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Bappeda Litbang melaksanakan 4 program dan 18 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2023 adalah realisasi fisik sebesar 100%, dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 8. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	7.181.499.370	100	97,90	EFISIEN
1.	Perencanaan Panggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.274.160	100	97,84	Efisien
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.939.243.239	100	98.00	Efisien
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.199.920	100	99.96	Efisien
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154.877.700	100	84,13	Efisien
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	722.194.120	100	99,42	efisien
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	261.497.101	100	98,082	efisien
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah	773.129.590	100	98,11	Efisien
8.	Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan	233.083.540	100	99.07	Efisien

	Pemerintahan Daerah				
B.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.107.978.000	100	99,46	EFISIEN
1.	Pemyusunan Perencanaan dan Pendanaan	468.681.000	100	99,51	efisien
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	181.561.000	100	99,79	efisien
3.	Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	305.000.000	100	99,27	efisien
4.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	152.736.000	100	99,31	Efisieni
c.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.471.532.400	100	98,72	EFISIEN
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	693.500.000	100	98,11	Efisien

2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	487.268.000	100	99.14	Efisien
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	290.764.400	100	99.50	Efisien
D.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	493.996.000	100	99,53	EFISIEN
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	186.100.000	100	99.85	efisien
2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	120.100.000	100	99.70	efisien
3.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	187.796.000	100	99.11	efisien
	Jumlah	10.255.005.770	100	98.26	Efisien

Sumber : Laporan Tahunan Bappeda Litbang tahun 2023.

Keterangan :

- Capaian Kinerja : Realisasi Indikator / Target Indikator x 100%
- Penyerapan Anggaran : Realisasi Keuangan Program/Kegiatan yang mendukung Indikator
- Tingkat Efisiensi : Capaian Kinerja – Penyerapan Anggaran

Secara keseluruhan pada tabel 3.8 diatas dapat dilihat bahwa dari sisi penggunaan anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 telah melaksanakan Program dan Kegiatan dengan

capaian memuaskan yang terlihat dari pencapaian kinerja 100% dengan tingkatan efisiensi yang efisien.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Sesuai RAPBD tahun anggaran 2023 Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan mengelola anggaran sebesar Rp. 10.255.005.770,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.580.953.019,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.920.969.201,00, serta Belanja Modal sebesar Rp. 753.083.550,00. Belanja Pegawai digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan, Belanja Modal digunakan untuk pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda 4 sebagai Kendaraan Operasional Kepala Bappeda Litbang, 2 (dua) unit Kendaraan Roda Dua serta Sarana dan Prasarana Kerja lainnya, sedangkan Belanja Barang dan Jasa digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan. Realisasi keuangan belanja urusan penunjang sebesar 97,90% dengan penyerapan dana sebesar Rp 7.030.432.658,00.

Jumlah Dana dan realisasi Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023, secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 9. Realisasi Belanja pelaksanaan kegiatan Tahun 2023

Program dan Kegiatan	Dana Kegiatan			Output (keluaran)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	7.181.499.370,-	7.030.432.658,-	97,90	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	82.274.160,-	80.494.530,-	97,84	
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.480.000,-	50.400.500,-	97,90	Dokumen RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, Renja, Renja Perubahan dan Perubahan Renstra
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.794.160,-	30.094.030,-	97,73	Lakip, LPPD, Lap. Triwulan dan Lap Tahunan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.939.243.239,-	4.840.534.882,-	98,00	
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.491.673.019,-	4.339.900.262,-	97,96	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN, Terlaksananya administrasi pelaksanaan Tugas ASN

8. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430.080.000,-	423.180.000,-	98.40	Dokumen laporan keuangan, Terpenuhinya jasa administrasi keuangan
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.490.220,-	17.463.620,-	99.85	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.199.920,-	15.193.620,-	99.96	
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.199.920,-	15.193.620,-	99.96	Dokumen BMD SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154.877.700,-	130.301.910,-	84.13	
5. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.513.200,-	10.993.010,-	87.85	Dokumen administrasi kepegawaian
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	142.364.500,-	119.308.900,-	83.81	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	722.194.120,-	718.011.031,-	99.42	
13. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.439.000,-	19.434.400,-	99.97	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.606.000,-	54.483.400,-	99.78	Peralatan dan perlengkapan kantor
15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.737.400,-	79.584.600,-	99.81	Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya makanan dan minuman
16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.416.720,-	26.364.720,-	89.62	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90.000.000,-	90.000.000,-	100	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	448.995.000,-	448.995.000,-	99.81	Dalam Daerah, Luar Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.201.800,-	487.091.300,-	99.98	
3. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	285.927.7900,-	271.409.820,-	94.92	
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	285.927.7900,-	271.409.820,-	94.92	Dokumen administrasi kepegawaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.497.101,-	256.472.965,-	98.08	
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.497.101,-	256.472.965,-	98.08	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.083.540,-	230.913.600,-	99.07	
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.310.100,-	156.225.600,-	98.68	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.263.440,-	55.178.000,-	99.85	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.510.000,-	19.510.000,-	100	Terpeliharanya Gedung Kantor
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.107.978.000,-	1.102.009.899,-	99.46	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	468.681.000,-	466.362.850,-	99.51	
5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	93.356.000,-	92.408.600,-	99.09	Memingkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
6. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	375.425.000,-	373.954.250,-	99.61	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
Analisis Data dan Informasi	181.561.000,-	181.180.791,-	99.79	

Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
3. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	181.561.000,-	181.180.791,-	99.79	Update data dan informasi pembangunan daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	305.000.000,-	302.782.064,-	99.27	
5. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	120.000.000,-	119.866.464,-	99.89	Meningkatkan pencapaian kinerja program/kegiatan pemerintah daerah
6. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	185.000.000,-	182.915.600,-	98.87	Peningkatan kualitas capaian pelaksanaan rencana pembangunan
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	152.736.000,-	151.684.194,-	99.31	
3. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintah Daerah	152.736.000,-	151.684.194,-	99.31	Tersedianya jumlah data dalam system informasi Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.471.532.400,-	1.452.741.450,-	98.72	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	693.500.000,-	680.363.228,-	98.11	
13. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	144.440.000,-	141.464.655,-	97.94	Tersedianya Dokumen Aksi Stunting
14. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	80.060.000,-	78.337.208,-	97.85	Tersedianya laporan Hasil Evaluasi PAMSIMAS
15. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.000.000,-	98.783.900,-	99.78	Terlaksananya advokasi indikator SDG's
16. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	75.000.000,-	74.876.330,-	99.84	Jumlah OPD yang di asistensi
17. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	150.000.000,-	145.337.511,-	96.89	Terlaksananya operasional tim TKPKD dan oprasional tim corporate social responsibility (CSR)
18. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	145.000.000,-	141.563.624,-	97.63	Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang sosbud
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	487.268.000,-	483.069.734,-	99.14	
11. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	48.765.000,-	47.548.900,-	97.51	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
12. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	138.953.000,-	138.700.484,-	99.82	Tersediannya Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Bidang Perekonomian
13. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	133.095.000,-	132.429.500,-	99.50	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA, Laporan gas rumah kaca (GRK), Dokumen RAD pangan dan Gizi, Laporan GRK Kabupaten Bengkulu Selatan

14. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	45.344.000,-	44.210.700,-	97.50	Tersediannya Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang SDA
15. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	121.111.000,-	120.180.150,-	99.23	Tersediannya Laporan Hasil Verifikasi Bidang SDA
Koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	290.764.400,-	289.308.488,-	99.50	
5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	38.746.400,-	38.439.050,-	99.21	Tersediannya Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur
6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	252.018.000,-	250.869.438,-	99.54	Laporan pokja PKP, Peningkatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang keciptakaryaan dan kewilayahan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	493.996.000,-	491.691.513,-	99.53	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	186.100.000,-	185.817.974,-	99.85	
3. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	186.100.000,-	185.817.974,-	99.85	Laporan analisis indeks daya saing daerah dan penginputan indeks pengelolaan keuangan daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	120.100.000,-	119.743.777,-	99.70	
3. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	120.100.000,-	119.743.777,-	99.70	Berkembangnya varietas unggul lokal kabupaten Bengkulu Selatan
Pengembangan inovasi dan Teknologi	187.796.000,-	186.129.762,-	99.11	
5. Penelitian, Pemhembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	153.296.000,-	153.068.262,-	99.85	Dokumen sistem inovasi daerah, Input indeks daerah, Lomba inovasi IPTEK
6. Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan	34.500.000,-	33.061.500,-	95.83	Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi

Sumber : Laporan Tahunan Bappeda Litbang 2023

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran pada Bappeda Litbang Tahun 2023 rata-rata diatas 95%, dari 44 sub kegiatan hanya terdapat 3 sub kegiatan yang realisasi anggaran dibawah 90%, yaitu untuk Sub Kegiatan Pendataan dan penegelolaan administrasi kepegawaian, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai serta Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak, dimana semua sub kegiatan ini adalah terdapat pada program Penunjang urusan.

3.4 Inovasi Perangkat Daerah

Untuk mendukung pencapaian Kinerja Bappeda Litbang, berikut beberapa inovasi yang telah dilakukan :

1. SIPDA (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)

Adapun tujuan dan Manfaat inovasi SIPDA adalah untuk mempermudah melaksanakan tugas menyusun evaluasi dan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta dapat mengetahui sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan melalui input realisasi anggaran sehingga mudah dalam melaksanakan penyusunan evaluasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini RKPD.

Dengan adanya inovasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Daerah akan lebih termonitoring, sebagaimana telah diterapkan bahwa setiap triwulan setiap Perangkat Daerah melaporkan realisasi fisik dan keuangan melalui aplikasi sipda, sehingga lebih mudah memonitor dan meningkatkan kualitas pengukuran Kinerja.

2. WARUNG PPM (Wadah dan Ruang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)

Tujuan dan manfaat yang diperoleh dengan dibangun inovasi Warung PPM, antara lain:

- a. Terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi, sinergi dan asistensi antar perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Terbangunnya sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu dan komprehensif.
- c. Tersedianya Informasi data yang akurat dan tepat sasaran berdasarkan objek yang di tetapkan dalam Warung PPM.

Adanya Inovasi Wadah dan Ruang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, memberikan dampak lebih pada

penyusunan Dokumen Perencanaan, sehingga kualitas Dokumen Perencanaan akan meningkat.

3. KLINIK INOVASI

Maksud dari Klinik Inovasi adalah memberikan Pendampingan dalam menumbuhkan budaya inovasi baik pada Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Yang bertujuan untuk :

1. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi Inovasi OPD
2. Melakukan Pendampingan dalam Pengembangan Inovasi OPD
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Inovasi OPD.

Seiring dengan berjalannya inovasi klinik inovasi yang terus digiatkan oleh Bidang Litbang Bappeda Litbang berupa mengasistensi Perangkat Daerah dalam membangun Inovasi daerah dilingkungan Perangkat Daerah, Tingkat Kematangan Inovasi terus membaik dan meningkatkan indeks Inovasi pada saat penilain IGA.

4. LEGENDA (Litbang Eksplorasi Genetik Daerah)

Tujuan dibangunnya Inovasi Legenda adalah agar Terlaksananya eksplorasi Sumber Daya Genetik lokal yang komprehensif, akseleratif, intensif dan sinergi dari semua pemangku kepentingan (Bidang Litbang Bappeda, Dinas Pertanian, BPP dan BPTP), sehingga diharapkan Manfaat Yang Diperoleh yaitu Peningkatan secara signifikan peluang diperolehnya SDG lokal yang potensial untuk didaftarkan.

5. SIPPUAS (Sistem Informasi Penilaian Kepuasan Masyarakat)

Inovasi Daerah Aplikasi SIPPUAS Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan. Pelayanan yang diberikan oleh ASN dilingkungan Bappeda Litbang nantinya menjadi tolak ukur dalam meningkatkan pelayanan, sehingga kedepannya seluruh potensi permasalahan dan kelemahan dalam pelayanan dapat diperbaiki dan ditingkatkan menuju kesempurnaan pelayanan.

BAB IV

PENUTUP

Bab 4 Berisikan :

- 1. Kesimpulan*
- 2. Saran dan Rekomendasi*

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Program dan Kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LKj juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2023 yang dituangkan menjadi 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama kepala Bappeda Litbang. LKj juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Capaian Kinerja berupaka Perjanjian Kinerja (PK). Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah untuk melakukan pengumpulan capaian kinerja data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan Pembentukan Tim Penyusunan.

Dalam Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 secara umum tujuan, Program kegiatan maupun sasaran telah dapat

dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Laporan Kinerja Bappeda Litbang Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja tahun 2023 dan Renstra 2021-2026 dikategorikan **"TINGGI"**. Kategori Sangat Tinggi tingkat capaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 adalah hasil Indeks Inovasi Daerah sebesar 93,55%. Hasil yang telah dicapai di tahun 2023 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target indicator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indicator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya system kerja di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergi satu sama lainnya.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala-kendala teknis yang perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain adalah :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program/kegiatan di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKj.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja dilingkungan Pemerintahan khususnya di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

